ISSN: 2797-2887

Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pengurus Koperasi) Melalui Pendidikan Perkoperasian Dari Dinas Koperasi Kota Surabaya

Miftakhur Rohmah[1*]
Kustini[2]

[1*,2]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

22012010095@student.upnjatim.ac.id [1*)]
kustini.ma@upnjatim.ac.id [2)]

Kata Kunci:
[Koperasi, Sumber Daya Manusia, Pendidikan Perkoperasian]

Abstrak: Dinas Koperasi Kota Surabaya, yang sebelumnya dikenal dengan nama Departemen Koperasi, memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di daerah tersebut. Sejak awal berdirinya pada dekade 1970-an hingga kini, lembaga ini telah bertransformasi menjadi instansi yang lebih mandiri, dengan fokus pada pengelolaan koperasi dan usaha kecil. Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus koperasi, Dinas Koperasi Kota Surabaya menyelenggarakan program pendidikan perkoperasian yang mencakup pelatihan tentang prinsip-prinsip koperasi, manajemen keuangan, serta penggunaan teknologi untuk efisiensi operasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengurus koperasi dalam mengelola aspek keuangan, administrasi, dan pemasaran, serta mendorong penerapan teknologi yang dapat memperbaiki kinerja koperasi di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, Dinas Koperasi juga melakukan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan bahwa materi pelatihan diterapkan secara efektif di lapangan. Pendidikan perkoperasian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan: pertama, perencanaan yang melibatkan koordinasi dengan petugas koperasi untuk menyusun program kerja tahunan; kedua, pelatihan kepada pengurus koperasi yang mencakup penggunaan aplikasi digital "Awasi Boyo" untuk pengawasan koperasi; dan ketiga, pendampingan untuk memantau sejauh mana implementasi pelatihan dilakukan dan untuk memberikan evaluasi serta saran perbaikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengurus koperasi dapat lebih memahami prinsip-prinsip dasar koperasi dan mampu mengelola koperasi dengan lebih efisien dan profesional. Evaluasi dari program ini menunjukkan bahwa pendidikan perkoperasian secara signifikan meningkatkan pemahaman pengurus koperasi, memperbaiki manajemen keuangan, serta mendukung peningkatan daya saing koperasi di pasar.

Published by:

Copyright © 2025 The Author(s)
This article is licensed under CC BY 4.0 License

Pendahuluan

Dinas Koperasi sebelumnya dikenal dengan nama Departemen Koperasi, yang didirikan pada dekade 1970-an. Pada awalnya, Departemen Koperasi memiliki tiga seksi, yaitu Perdagangan, Koperasi, dan Transmigrasi. Pada periode berikutnya, tepatnya sejak tahun 1985, Departemen Koperasi menjadi lembaga yang lebih mandiri, dengan fokus utama pada dua bidang: perdagangan dan koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi, yang operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasari oleh asas kekeluargaan. Koperasi tidak hanya diimplementasikan secara normatif melalui Pasal 33 UUD 1945, namun lebih dari itu, koperasi memiliki keunggulan dibandingkan lembaga ekonomi lainnya, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh anggotanya, yang mencakup bukan hanya aspek material, tetapi juga tenaga kerja dan hubungan sosial antar anggota.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas untuk menjalankan urusan pemerintahan yang terkait dengan koperasi dan usaha kecil serta menengah, sebagaimana diatur dalam Pasal 552, 553, dan 554 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementerian Negara dan Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan negara, khususnya dalam mengelola koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi fokus perhatian utama.

Casselman dalam Firdaus (2002: 39) menyatakan bahwa koperasi adalah "cooperation is an economic system with social contrast," yang berarti koperasi merupakan sebuah sistem ekonomi yang juga mengandung unsur sosial. Koperasi sendiri adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok individu yang secara sukarela berkumpul untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama. Beberapa ciri utama koperasi antara lain keanggotaan yang terdiri dari individu maupun badan hukum, prinsip-prinsip koperasi yang mendasari operasionalnya, dan asas kekeluargaan yang menjadi dasar pendiriannya. Selain itu, koperasi dikelola secara bersama dan dijalankan dengan prinsip demokrasi.

Koperasi perlu dikelola secara efisien dan terencana untuk mengembangkan kegiatan yang berperan penting bagi masyarakat, khususnya dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional (Sulistrowati, T.Y., 2015 dalam Fauzi, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam koperasi menjadi sangat krusial. Peningkatan SDM ini mencakup penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk mengarahkan koperasi ke arah yang lebih baik.

Pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pengurus koperasi, menjadi faktor penentu dalam kesuksesan koperasi itu sendiri. Pengurus koperasi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih mampu mengelola koperasi dengan baik, memanfaatkan sumber daya yang ada, serta memperkuat hubungan sosial di antara anggota koperasi. Oleh karena itu, pendidikan perkoperasian yang diberikan oleh Dinas Koperasi Kota Surabaya berperan strategis dalam meningkatkan kemampuan pengurus koperasi, guna mendukung pertumbuhan koperasi yang sehat dan berkelanjutan di daerah tersebut.

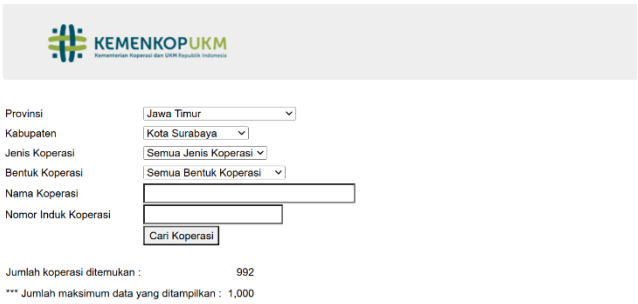
Pendidikan perkoperasian menghasilkan pemahaman dalam bidang akuntansi koperasi, manajemen keuangan, serta strategi untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar koperasi. Selain itu, pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai produk serta mengimplementasikan teknologi yang relevan dalam pengelolaan unit usaha koperasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara teoretis, pendidikan perkoperasian yang diberikan kepada pengurus koperasi akan mendorong rasa optimisme dalam menjalankan tugas mereka. Pelatihan ini juga berpotensi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, profesionalisme, dan kinerja para pengurus dan karyawan koperasi.

Permasalahan yang menjadi acuan dilaksanakannya pendidikan perkoperasian pada pengurus koperasi yakni masih terbatasnya pemahaman pengurus tentang prinsip-prinsip dasar koperasi, kurangnya keterampilan dalam mengelola aspek keuangan dan administrasi koperasi, serta rendahnya daya saing koperasi di pasar. Selain itu, tantangan dalam penerapan teknologi yang relevan dan efisien untuk meningkatkan kualitas produk serta pengelolaan unit usaha juga menjadi faktor penting yang perlu diatasi melalui pendidikan yang terstruktur.

Menangani permasalahan yang terjadi pada koperasi binaanya, Dinas Koperasi Kota Surabaya mengadakan pendidikan perkoperasian untuk meningkatkan pengetahuan tentang prinsip – prinsip koperasi dan penerapan teknologi yang relevan dalam operasional koperasi. Pengetahuan mengenai perkoperasian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi, baik dalam bentuk aktif maupun pasif. Partisipasi aktif dari setiap anggota sangat diperlukan untuk kelangsungan koperasi, dan hal ini dapat terwujud jika anggota memiliki rasa kepemilikan terhadap koperasi tersebut (Anasrulloh & Rokhim, 2021). Beberapa penelitian telah mengkaji dampak pendidikan atau pengetahuan perkoperasian terhadap tingkat partisipasi anggota. Salah satu studi yang dilakukan oleh Trisuladana & Suparman (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendidikan perkoperasian dengan tingkat partisipasi anggota dalam koperasi.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bertempat di Dinas Koperasi Kota Surabaya pada tanggal 13 agustus – 13 desember 2024. Khalayak sasaran dari Pendidikan perkoperasian ini adalah pengurus koperasi binaan kota Surabaya dengan jumlah 992 koperasi ditemukan dalam ODS (*Online Data System).*



Gambar 1. ODS (*Online Data System)*

Dalam pelaksanaan Pendidikan perkoperasian, Dinas Koperasi Kota Surabaya mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut :

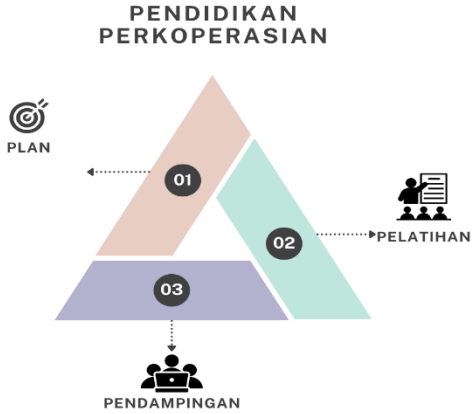
1. *Tahap pertama,* Dinas Koperasi Kota Surabaya melakukan koordinas dengan petugas koperasi mengenai program kerja tahunan Dinas Koperasi dan masalah yang terjadi dilapangan.
2. *Tahap kedua,* Dinas koperasi mengadakan pelatihan pada pengurus koperasi terkait dengan program kerja tahunan Dinas koperasi serta aplikasi baru yang bisa menunjang kegiatan operasional koperasi – koperasi binaanya.
3. *Tahap ketiga*, Dinas koperasi melakukan pendampingan terhadap koperasi – koperasi binaanya untuk melihat sejauh mana materi dan pelatihan yang disampaikan telah diserap dan diterapkan pengurus pada koperasi wilayahnya. Dalam pendampingan ini Dinas Koperasi bisa mengevaluasi dan memberikan masukan kepada pengurus koperasi binaanya terkait masalah – masalah yang dihadapi koperasi.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan perkoperasian, menurut Mangun Wijaya (2000), adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi, khususnya pengurus, dalam mengelola koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk membekali anggota dengan kemampuan manajerial dan administratif yang diperlukan dalam pengelolaan koperasi agar dapat bersaing dan berkembang. Sementara itu, Sudirman (2010) menjelaskan bahwa pendidikan perkoperasian adalah upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam bidang ekonomi koperasi, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi yang mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi dengan efisien.

Djumhur H. (2009) menambahkan bahwa pendidikan perkoperasian merupakan proses yang bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya koperasi kepada anggota dan pengurusnya, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan koperasi dengan prinsip demokratis dan transparansi. Suryana (2014) juga mengemukakan bahwa pendidikan perkoperasian bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anggota koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi serta meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang administrasi, manajemen keuangan, dan pengembangan usaha koperasi. Selanjutnya, Mardikanto (2003) berpendapat bahwa pendidikan perkoperasian merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan anggota koperasi dalam mengelola koperasi secara efisien dan efektif, mencakup berbagai aspek penting seperti manajemen, akuntansi, dan pemanfaatan teknologi yang relevan.

Pendidikan koperasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi Kota Surabaya mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut :



Gambar 2. Tahapan Pendampingan

1. Planning

George (2021), Steiner menyatakan bahwa perencanaan adalah sebuah proses yang melibatkan penetapan tujuan, penentuan batasan strategi, kebijakan, dan perencanaan yang terperinci untuk mencapainya. Perencanaan juga mencakup upaya organisasi dalam menerapkan keputusan, serta melakukan evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik, yang berfungsi sebagai dasar untuk merancang siklus perencanaan baru. Sedangkan Menurut Erly Suandy (2021), perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi yang kemudian dijabarkan dengan jelas melalui berbagai strategi, taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara menyeluruh.

Menurut George R. Terry (2007), tujuan perencanaan adalah untuk memastikan organisasi dapat mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif. Perencanaan berfungsi sebagai panduan untuk menetapkan arah yang jelas, meminimalkan ketidakpastian, dan mendukung manajer dalam membuat keputusan yang tepat waktu. Koontz dan O'Donnell (1980) menambahkan bahwa tujuan utama perencanaan adalah mempersiapkan organisasi menghadapi masa depan secara sistematis, dengan memberikan panduan bagi pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya secara optimal. Hal yang serupa juga disampaikan oleh William H. Newman (1987), yang menyatakan bahwa tujuan perencanaan adalah untuk menciptakan struktur yang jelas dalam organisasi yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta membantu organisasi merespons tantangan masa depan dengan lebih siap.

Dinas Koperasi Kota Surabaya telah merumuskan perencanaan yang matang untuk mengembangkan kinerja operasional koperasi binaannya dengan tujuan agar koperasi memiliki daya saing yang lebih tinggi dan berkembang dengan baik. Namun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan koperasi, yaitu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi dan rendahnya tingkat pertumbuhan koperasi itu sendiri.

Masalah pertama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi, yang mengakibatkan pengurus koperasi belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai, pemahaman yang cukup mengenai regulasi perkoperasian, dan keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Koperasi Kota Surabaya menyelenggarakan pendidikan perkoperasian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus koperasi mengenai manajemen koperasi yang baik, serta memperkenalkan teknologi yang dapat mendukung pengelolaan koperasi yang lebih efisien dan modern.

Permasalahan kedua adalah rendahnya pertumbuhan koperasi. Banyak koperasi yang menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha dan memperluas jaringan pasar, disebabkan oleh kurangnya keterampilan dalam pemasaran, pengelolaan sumber daya yang terbatas, dan kesulitan dalam mengakses modal yang cukup. Dalam konteks ini, pendidikan perkoperasian yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan pengurus koperasi pengetahuan dan keterampilan dalam merumuskan strategi pemasaran, mengelola keuangan, serta mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan daya saing koperasi di pasar yang semakin kompetitif.

Dengan adanya perencanaan pendidikan yang terstruktur dan berfokus pada peningkatan kualitas SDM pengurus koperasi, diharapkan koperasi binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada dan mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dalam hal kinerja operasional maupun dalam memperluas jangkauan pasar. Seiring dengan itu, kualitas pengelolaan koperasi yang lebih baik akan membawa dampak positif bagi daya saing koperasi, serta mendukung tercapainya tujuan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

2. Pelatihan

Vancevich (2008) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan sebuah proses yang terstruktur untuk mengubah perilaku kerja karyawan dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sementara itu, Mon & Mulyadi (2021) mendefinisikan pelatihan sebagai kegiatan pengajaran yang diberikan kepada karyawan baru maupun lama untuk meningkatkan keterampilan dasar yang diperlukan dalam pekerjaan mereka.

Di sisi lain, Sri Larasati (2018:110) berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu bentuk pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan teknis kepada tenaga kerja non-manajerial untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks koperasi di Kota Surabaya, program pelatihan yang diselenggarakan mencakup berbagai kegiatan, salah satunya adalah sosialisasi terkait dengan pengelolaan koperasi dan peningkatan kapasitas pengurus koperasi.

Secara umum, Sari (2009) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah suatu proses di mana nilai, kebiasaan, dan aturan ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Beberapa pihak bahkan menganggap sosialisasi sebagai teori yang menjelaskan peran (role theory), di mana individu belajar mengenai berbagai peran yang harus mereka jalankan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, melalui kegiatan sosialisasi, peserta diberikan pengetahuan terkait dengan peraturan, informasi, serta program-program yang ada di Dinas Koperasi Kota Surabaya. Dinas Koperasi Kota Surabaya rutin melakukan sosialisasi kepada koperasi-koperasi yang berada di bawah naungannya, dengan tujuan untuk memperkenalkan kebijakan dan mendukung pengembangan koperasi.

Pada tanggal 11 Oktober 2024, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengadakan sosialisasi penting mengenai pelaksanaan pendataan dan penilaian Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi.



Gambar 3. Dokumentasi Sosialisasi oleh Kemenkop UKM

Pada sosialisasi ini, dibahas dua pendekatan utama dalam pendataan dan penilaian Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi, yaitu sistem *close loop* dan *open loop*. Pengertian *Close loop* dan *Open loop* sendiri yakni, *Close loop* merupakan sistem pendataan dan penilaian yang diterapkan dalam koperasi beroperasi dengan siklus tertutup, di mana seluruh transaksi keuangan, pendanaan, dan kegiatan usaha lainnya berlangsung sepenuhnya dalam lingkungan internal koperasi. Dalam sistem ini, anggota koperasi memegang peranan yang sangat penting, karena setiap keputusan terkait keuangan dan pinjaman diambil oleh, untuk, serta dari anggota itu sendiri. Pendekatan ini sering kali dianggap lebih aman, sebab aliran uang dan pengelolaan aset tetap berada dalam ekosistem koperasi, sehingga dapat meminimalkan risiko dari faktor eksternal.

Disisi lain, *Open Loop* mempunyai pengertian sistem pendekatan yang lebih terbuka, memungkinkan koperasi untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal dalam hal akses pendanaan atau pelaksanaan transaksi bisnis. Koperasi yang menerapkan sistem ini biasanya lebih fleksibel dalam melakukan ekspansi usaha, karena mereka dapat menerima dana dari luar atau menjalin kerjasama dengan entitas yang bukan anggota. Meski demikian, sistem ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti risiko pengelolaan keuangan yang lebih kompleks dan potensi berkurangnya kontrol koperasi terhadap aliran dana.

Tujuan dari sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada 11 Oktober 2024 adalah untuk mempersiapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses verifikasi lapangan dengan menggunakan metode self-declare konfirmasi, yang dijadwalkan berlangsung dari Oktober hingga November 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pendataan dan penilaian Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi, serta memperkenalkan dua pendekatan utama dalam proses tersebut, yaitu close loop dan open loop. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antara Kemenkop UKM, Dinas Koperasi dan UKM di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta PT. Surveyor Indonesia, yang akan menjalankan kegiatan verifikasi, untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan proses verifikasi yang melibatkan sekitar 700 peserta di Surabaya.

3. Pendampingan

Wiryasaputra (2006) menjelaskan bahwa pendampingan adalah suatu proses interaksi antara pendamping dan individu yang didampingi, dengan tujuan untuk membantu individu tersebut memahami dan menghayati keberadaannya serta mengalaminya secara menyeluruh. Melalui proses ini, individu didampingi untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mengalami perubahan, pertumbuhan, dan mencapai potensi penuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pendampingan merupakan suatu proses yang dinamis, yang mengalami perubahan

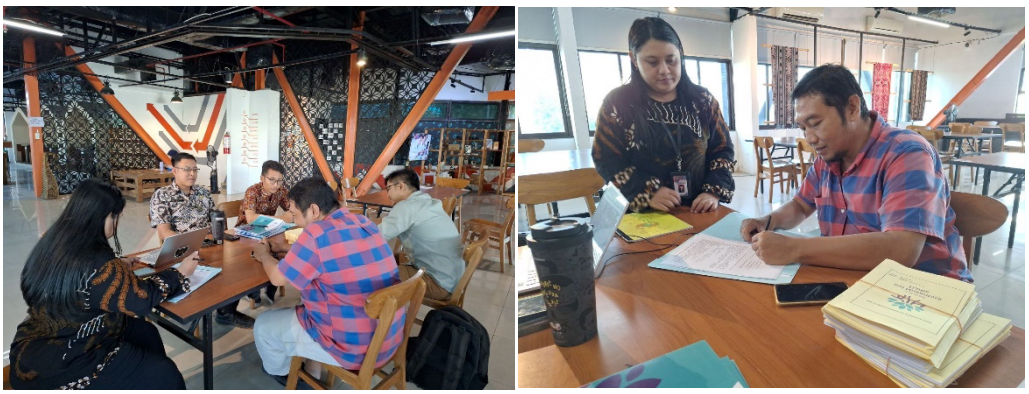
seiring berjalannya waktu, dengan berbagai irama dan warna, mencerminkan sifatnya yang terus berkembang.

Pendampingan dalam konteks ini merupakan agenda *monitoring* atau pengawasan koperasi, fungsi dari pengawasan koperasi dijabarkan dalam Peraturan Deputi Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 sebagai berikut :

a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Terlaksananya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi.
c. Meningkatnya citra dan kredibilitas usaha simpan pinjam yang dikelola oleh koperasi sebagai aset keuangan yang dapat mengelola kegiatan usaha tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
f. Meningkatnya manfaat ekonomi yang dirasakan oleh anggota melalui kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi.

Pengawasan, menurut George R. Terry (2005:232), dapat dipahami sebagai proses untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, dan, jika diperlukan, menerapkan tindakan perbaikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Sementara itu, Siagian (2001:25) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas yang bertanggung jawab di bidang koperasi untuk memastikan bahwa kegiatan koperasi dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Pengawasan Koperasi).



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan

Dinas koperasi kota Surabaya dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi dengan menggunakan unsur-unsur yang harus dipantau yaitu meliputi :

a. Jenis kelengkapan laporan setiap stahun sekali.

b. Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah RAT dilaksanakan dan RAT selama 3 (tiga) tahun berturut - turut harus dlaporkan pelaknsanaannya.
c. Kelengkapan informasi laporan sesuai dengan Standart Operasional Manajemen (SOM) yang diatur oleh Peraturan Menteri.
d. Kesesuaian pelakuan akuntasi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh pemikiran dilakukan berdasarkan prinsip akuntansipedoman umum koperasi yang berlaku secara umum
e. Kesesuaian penyajian laporan keuangan yang memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, Dinas koperasi kota surabaya terdapat hambatan-hambatan salah satunya Tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Dinas koperasi kota Surabaya.

Untuk mengatasi tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT setiap tahun, maka pihak Dinas koperasi kota Surabaya menghubungi koperasi bersangkutan untuk secepatnya menyampaikan laporan RAT tahunan yang dikelola oleh pengurus koperasi tersebut. Pelaporan RAT dapat dilakukan secara digital dengan mengirimkan dokumen – dokumen yang diminta melalui WhatsApp atau Gmail petugas koperasi.

Hal ini dilakukan untuk mendisiplinkan koperasi serta juga mendukung gerakan paperless, penginputan data koperasi juga dapat dilakukan secara online dengan penggunaan aplikasi ‘Awasi Boyo’. Aplikasi merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Koperasi kota Surabaya untuk menunjang digitalisasi.

Aplikasi "Awasi Boyo" telah terintegrasi dengan sistem pelayanan Online Data System (ODS) Koperasi, yang memungkinkan pengawasan terhadap koperasi dilakukan secara lebih efisien. Aspek yang diawasi mencakup permodalan dan kepatuhan, yang merupakan indikator utama dalam menilai apakah koperasi tersebut sehat atau tidak. Dengan memanfaatkan data yang terkumpul melalui ODS dan "Awasi Boyo", Dinas Koperasi Kota Surabaya dapat secara lebih akurat menilai status kesehatan koperasi, termasuk analisis terhadap kecukupan modal, keteraturan administrasi, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan. Integrasi teknologi ini mempermudah proses pengawasan dan pembinaan koperasi, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi di Kota Surabaya.

Dalam penginputan data terdapat petugas koperasi dalam proses penginputan data saat pengawasan menjadi bagian integral dari upaya Dinas Koperasi Kota Surabaya untuk memastikan implementasi digitalisasi dalam pengelolaan koperasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pendampingan ini bertujuan untuk membimbing pengurus koperasi dalam menginputkan data secara akurat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, terutama saat dilakukan pengawasan terhadap kesehatan koperasi. Selama pendampingan, petugas koperasi diberikan pelatihan praktis mengenai penggunaan aplikasi "Awasi Boyo", termasuk cara mengelola data keuangan, laporan kegiatan usaha, dan informasi anggota koperasi. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pengurus koperasi dapat lebih memahami dan menguasai aplikasi, sehingga meningkatkan efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data koperasi serta memudahkan proses pengawasan yang lebih efektif.

Kesimpulan

Pendidikan perkoperasian, menurut Mangun Wijaya (2000), merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi, terutama pengurus, dalam mengelola koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah membekali anggota dengan kemampuan manajerial dan administratif yang diperlukan agar koperasi dapat bersaing dan berkembang. Sebagaimana dijelaskan oleh Mardikanto (2003), pendidikan ini berfokus pada peningkatan kemampuan anggota dalam mengelola koperasi secara efisien dan efektif, termasuk dalam aspek manajemen, akuntansi, dan penggunaan teknologi yang relevan. George (2021) dan Terry (2007) mengungkapkan bahwa perencanaan merupakan proses yang terstruktur untuk menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, serta langkah-langkah rinci untuk mencapainya. Dalam konteks koperasi, perencanaan yang baik diharapkan dapat memastikan koperasi memiliki daya saing yang lebih tinggi dan berkembang dengan baik.

Dinas Koperasi Kota Surabaya merancang perencanaan yang matang guna mengatasi masalah pengelolaan koperasi, salah satunya adalah rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi yang mengakibatkan kekurangan keterampilan manajerial, pemahaman terhadap regulasi, dan kesulitan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Koperasi Kota Surabaya menyelenggarakan pendidikan perkoperasian yang bertujuan untuk memperkenalkan teknologi dan manajemen koperasi yang lebih modern, serta mendukung pengurus koperasi untuk dapat bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif.

Sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus koperasi, Dinas Koperasi Kota Surabaya juga menyelenggarakan program pelatihan yang mencakup berbagai topik, salah satunya adalah sosialisasi terkait pengelolaan koperasi, peraturan, dan kebijakan yang ada di dinas koperasi. Vancevich (2008) mendefinisikan pelatihan sebagai proses yang terstruktur untuk mengubah perilaku kerja karyawan demi meningkatkan kinerja organisasi. Di sisi lain, Mon & Mulyadi (2021) menjelaskan bahwa pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh karyawan, sedangkan Sri Larasati (2018) menekankan bahwa pelatihan merupakan pendidikan jangka pendek untuk meningkatkan keterampilan teknis non-manajerial.

Selain itu, pada 11 Oktober 2024, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengadakan sosialisasi secara daring terkait pelaksanaan pendataan dan penilaian Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi, di mana sosialisasi ini bertujuan untuk mempersiapkan semua pihak yang terlibat dalam verifikasi lapangan dengan metode self-declare konfirmasi. Wiryasaputra (2006) menjelaskan bahwa pendampingan adalah suatu proses interaksi yang bertujuan membantu individu memahami dan menghayati keberadaannya, yang juga berlaku dalam pendampingan koperasi untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam mengelola koperasi secara lebih efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sebagai langkah lanjutan, Dinas Koperasi Kota Surabaya juga memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan terhadap koperasi melalui aplikasi "Awasi Boyo", yang terintegrasi dengan sistem pelayanan Online Data System (ODS) Koperasi. Aplikasi ini

memungkinkan pengawasan lebih efisien terkait dengan permodalan, kepatuhan, dan kesehatan koperasi. Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Surabaya bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku, serta mendukung implementasi digitalisasi dalam pengelolaan koperasi.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan dan pelaksanaan Jurnal Pengabdian Masyarakat ini yang berjudul **"STRATEGI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (PENGURUS KOPERASI) MELALUI PENDIDIKAN PERKOPERASIAN DARI DINAS KOPERASI KOTA SURABAYA"**.

Pertama, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Dinas Koperasi Kota Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Dukungan yang diberikan berupa akses informasi, fasilitas, serta kerjasama yang baik sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan program pendidikan perkoperasian bagi pengurus koperasi di Kota Surabaya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pengurus koperasi yang telah aktif berkontribusi dengan antusiasme mereka dalam setiap tahapan pengabdian. Keikutsertaan dan semangat mereka dalam mengembangkan koperasi sangat mendukung kesuksesan program ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program ini. Tidak lupa, penulis menghaturkan terima kasih kepada rekan-rekan akademik dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga yang sangat membantu dalam penyusunan jurnal ini.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi yang tak ternilai selama proses penulisan jurnal pengabdian ini. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan koperasi di Kota Surabaya dan menjadi referensi bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi di berbagai daerah.

Referensi

Syaiful, M., Bantun, S., Sari, J. Y., Daiona, A. I. B., & Novriadi, T. (2022). PENDIDIKAN DASAR KOPERASI (DIKSARKOP) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 751–756.

Sugiana, F. S., Ardiwinata, J. S., & Pramudia, J. R. (2020). PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN WIRAUSAHA MELALUI PEMANFAATAN PROGRAM DANA DESA. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, *2*(2), 45–55.

Beni, S., & Manggu, B. (2019). Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi Se-Kabupaten Bengkayang Tahun 2019: Manajemen Pengawasan Koperasi: Technical Guidance for Cooperative Supervision in Bengkayang Regency in 2019: Cooperative

Supervision Management. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 67–71.

DWIPRADNYANA, I. M. M., PRATIWI, I. G. A. M. A. M. A., & DIATMIKA, I. G. N. D. (2020). Strategi Pengembangan Koperasi Di Era Digital Pada Koperasi Yang Ada Di Provinsi Bali. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, *17*(2), 112–116.

AULIA, T. D. (2021). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KOMPETENSI PENGURUS KOPERASI DI JAWA TIMUR DENGAN E-LEARNING SIJAWARA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, *1*(2), 183–191.

Syaiful, M., Hariono, H., & Anjasari, M. (2022). Establishment of an entrepreneurial studio as a forum for increasing student entrepreneurship interest. Community Empowerment, 7(3), 447–452.